

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya untuk pengambilan keputusan. Meningkatnya tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan telah mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan Keuangan yang dihasilkan harus disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang merupakan pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami agar para pemakai laporan keuangan mendapatkan informasi yang berkualitas.

Laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap tuntutan publik atas pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang semua informasi yang ada dalam laporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh pemerintah daerah, sangat dibutuhkan oleh banyak pihak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka dari itu informasi didalam laporan keuangan harus dapat dipercaya agar bermanfaat bagi para pemakainya.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih rendah. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz. Harry mengatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih bermasalah dalam hal tata kelola, pemerintah daerah masih lamban dalam mengejar kualitas laporan keuangannya dan belum sampai ke upaya penggunaan untuk kesejahteraan rakyat (Kompas.com 2015).

Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2015. Hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 dilakukan atas 504 LKPD dimana BPK hanya memberikan opini WTP kepada 251 LKPD atau 49,80% masih dibawah 60% seperti yang ditargetkan pemerintah pusat. Opini WDP sebanyak 45,64%, Opini TW 0,79% dan opini TMP 3,77%. Hasil pemeriksaan BPK mengungkap LKPD yang masih mendapatkan opini WDP atau TMP disebabkan oleh lemahnya kompetensi sumber daya manusia dalam menerapkan SPIP serta SAP, Teknologi Informasi (TI) pada pemerintah daerah belum optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan yang akurat dan lengkap dan pengembangan pertanggungjawaban aplikasi serta peningkatan infrastruktur TI belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, adanya internal audit sebagai pengawas tidak berjalan optimal atau tidak memadai, jumlah dan kualitas sumber daya manusia sebagai petugas pencatat laporan keuangan belum kompeten yang mengakibatkan penyajian aset tetap dalam neraca tidak valid dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya (www.bpk.go.id/ihps)

Permasalahan yang terjadi pada LKPD disebabkan karena pejabat yang bertanggung jawab tidak mentaati dan memahami ketentuan yang berlaku dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Lemahnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta penggunaan pada sistem aplikasi yang digunakan. Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil laporan keuangan belum memberikan informasi yang berkualitas. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi kompetensi sumber daya manusia agar dapat bekerja sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan dapat memanfaatkan fungsi teknologi informasi dengan baik.

Demi terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2010 pasal 1, Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pendidikan, pengetahuan, keahlian dan sikap profesional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses peningkatan

pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan (Bangun, 2012, hlm.9). Terdapat sejumlah hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten terkait dengan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan seperti penelitian yang dilakukan oleh Pradono & Basukianto (2015) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, artinya semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuryanto & Nur Afiah (2013), Anggun (2016), Kurniawan (2016) dan Setyowati, dkk (2016) yang juga menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Agustini (2016) dan Syarifudin (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Menurut Setyowati (2016) Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas., yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Menurut Ardana & Lukman (2016, hlm.58) teknologi informasi adalah semua peralatan, media, teknik, metode yang dipakai dalam rangka merekam data, mengirim dan menerima data, menyimpan data dan informasi. Terdapat sejumlah hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten terkait dengan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nuryanto & Nur Afiah (2013), Pradono & Basukianto (2015), Kurniawan (2016), Anggun (2016), Yuliani & Agustini (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2016) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. menurutnya pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan peran teknologi

informasi padahal pemanfaatan teknologi informasi membantu pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ke arah yang lebih baik.

Pemerintah perlu meningkatkan kualitas internal audit guna meningkatkan peran pengawasan, pembinaan, pemantauan serta review laporan keuangan sehingga mampu bekerja secara professional, obyektif dan independen (Syarifudin, 2014). Dengan adanya internal audit atau inspektorat yang menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat membantu pemerintah dalam menyiapkan dan menciptakan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sehingga laporan keuangan yang akan dipublikasikan oleh pemerintah berisikan informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh seluruh pengguna laporan keuangan. Terkait dengan pengaruh peran internal audit terhadap kualitas informasi laporan keuangan, ada beberapa penelitian terdahulu yang masih belum konsisten, penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2016) menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, menurutnya peran internal audit akan dapat membantu pemerintah dalam menyiapkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan handal untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, namun pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2014) yaitu internal audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah, karena menurutnya internal audit tidak mengerjakan langsung dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut masih ada ketidak konsistenan hasil dari peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Setyowati, dkk (2016). Perbedaan penelitian ini dibandingkan yang dilakukan Setyowati, dkk (2016) adalah terletak pada objek penelitian yaitu pada SKPD yang berlokasi di kota Semarang. Tahun penelitian yaitu 2016. Untuk variabel bebas menggunakan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan peran internal audit dan variabel terikat peneliti menggunakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Semarang. Sedangkan dalam penelitian ini objek penelitian yaitu SKPD kota

Bogor, penelitian pada tahun 2017. Variabel dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, peran internal audit dan 1 variabel terikat yaitu kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- b. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- c. Apakah Peran Internal Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Untuk membuktikan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Untuk membuktikan Peran Internal Audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi di bidang Akuntansi Pemerintahan terutama yang berkaitan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran internal audit.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk menjadi titik ukur dalam menilai kinerja aparatur pemerintahan dan perangkat-perangkat organisasi yang terkait di dalamnya untuk mewujudkan *good governance* yang salah satu indikatornya tercermin melalui kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Diharapkan dapat mengembangkan literatur tentang sektor publik yang berkaitan dengan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Diharapkan dengan adanya penelitian ini, mampu menambah bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai variabel-variabel terkait.